



LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH (LKIP) **DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BEKASI**

TAHUN 2024



Jl. A.Yani No.1 Gedung D Lt 7, Bekasi
Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat



<https://disparbud.bekasikota.go.id>

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi merupakan suatu bentuk format pertanggungjawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja. Secara umum LKIP ini bermanfaat untuk (1) mendorong instansi pemerintah melaksanakan Good Governance, karena LKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan (2) memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dengan instansi pemerintah dan (3) meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

Tujuan penyusunan LKIP sebagai pertanggung-jawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Rencana Strategis dan sebagai tindak lanjut atas implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengemban tugas sebagai pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Pariwisata dan Bidang Kebudayaan telah menetapkan Tujuan dan Sasaran beserta indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta program dan kegiatan yang mengacu pada Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Penyusunan LKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi diharapkan dapat memberikan penjelasan dan gambaran kepada semua pihak tentang pertanggungjawaban kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan hasil capaian sebagai berikut :

1. Sasaran I : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja, yang didukung indikator sasaran Nilai Hasil Evaluasi AKIP dengan realisasi tahun 2024 sebesar 70,03 dari target Nilai Hasil Evaluasi AKIP sebesar 78, persentase capaian sebesar 89,78%.
2. Sasaran II : Meningkatnya pengembangan potensi pariwisata, yang didukung indikator sasaran Persentase Kawasan Wisata yang dikembangkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 5 % dari target sebesar 4,76%, persentase capaian sebesar 105%.
3. Sasaran III : Meningkatnya kunjungan wisatawan yang didukung oleh indikator sasaran ke-1 : Persentase peningkatan kunjungan wisatawan yang datang ke kabupaten/kota dengan realisasi tahun 2024 sebesar 95,35% dari target sebesar 10%, persentase capaian sebesar 953,5%. Indikator sasaran ke-2 Rata-Rata Lama Menginap dengan realisasi 2 malam dari target 2 malam, persentase capaian 100%.
4. Sasaran IV: Meningkatnya pengembangan dan pelestarian seni dan budaya Bekasi yang didukung oleh indikator sasaran ke-1: Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dengan realisasi sebesar 9,37 % dari target sebesar 9%, persentase capaian sebesar 104%. Indikator sasaran ke-2 Persentase sanggar budaya yang dikembangkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 5 % dari target sebesar 5 %, persentase capaian 100%.

Demikian ikhtisar eksekutif tentang pencapaian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2024.

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Bekasi ini merupakan perwujudan atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2024, LKIP ini merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi 2024-2026.

Penyusunan LKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Mengacu kepada Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui LKIP Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Bekasi tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran unit dan peningkatan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Bekasi secara keseluruhan dan mewujudkan *Good Governance dan Clean Government*.

Bekasi, 31 Januari 2024

**Kepala Dinas Pariwisata Dan
Kebudayaan Kota Bekasi**

Dr. Arief Maulana, S.T., M.M
Pembina Utama Muda IV.c
NIP. 19711013 199703 1 004

DAFTAR ISI

Ikhtisar Eksekutif	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI.....	3
1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	4
1.4 KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI	6
1.5 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	15
1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN	16
BAB II.....	17
PERENCANAAN KINERJA.....	17
2.1 Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026	17
2.2 Rencana Strategis	17
2.3 Perjanjian Kinerja.....	19
BAB III.....	21
AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	21
3.2 Analisis atau Efisiensi Penggunaan Sumber daya	33
3.3 Analissi Efisiensi Anggaran.....	33
3.4 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.	34
3.5 Realisasi Anggaran.....	41
BAB IV.....	43
PENUTUP.....	43
4.1 Kesimpulan	43
4.2 Rencana Tindak.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi**Error! Bookmark not defined.**
No table of figures entries found.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target	2
Tabel 1.2 Data Pegawai Berdasarkan Golongan	7
Tabel 1.3 Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	7
Tabel 1.4 Data Kebutuhan Personil Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Berdasarkan Analisa Jabatan.....	8
Tabel 1.5 Data Inventaris Kantor	12
Tabel 1.6 Data Aset Bangunan	13
Tabel 1.7 Data Aset Kendaraan Dinas.....	14
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target	18
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	19
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja.....	22
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja “ Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan Tahun Sebelumnya	23
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja “ Nilai AKIP “ dengan Target Akhir Renstra 2024-2026	23
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya pengembangan potensi Pariwisata ...	24
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja “ Meningkatnya pengembangan potensi pariwisata dengan Tahun Sebelumnya	24
Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Meningkatnya pengembangan potensi pariwisata“ dengan Target Akhir Renstra 2024-2026	25
Tabel 3.7 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	26
Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja “Meningkatnya Kunjungan Wisatawan dengan Tahun Sebelumnya”	27
Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja “Meningkatnya Kunjungan Wisatawan” dengan Target Akhir Renstra 2024-2026	28
Tabel 3.10 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	28
Tabel 3.11 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja “Meningkatnya Kunjungan Wisatawan dengan Tahun Sebelumnya	29
Tabel 3.12 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja “Meningkatnya Kunjungan Wisatawan” dengan Target Akhir Renstra 2024-2026	29
Tabel 3.13 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Bekasi	30
Tabel 3.14 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja “ Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Bekasi dengan Tahun Sebelumnya	31
Tabel 3.15 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja “ Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Bekasi “ dengan Target Akhir Renstra 2024-2026	31
Tabel 3.16 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Bekasi	32
Tabel 3.17 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja “Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Bekasi dengan Tahun Sebelumnya	32
Tabel 3.18 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja “ Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Bekasi “ dengan Target Akhir Renstra 2024-2026	33
Tabel 3.19 analisis Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2024	35

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini mencakup dalam beberapa yaitu Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Penyusunan LKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi berpedoman pada Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2024 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu penyusunan laporan diharapkan dapat menjadi suatu bentuk pertanggungjawaban kinerja organisasi kepada seluruh pemangku kepentingan (Wali Kota, DPRD dan seluruh masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk formal pertanggung jawaban instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi yang bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (Good Governance). Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.
3. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penyusunan LKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2024 dimaksudkan untuk menyajikan ketercapaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam satu tahun anggaran yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi. Adapun gambatan pencapaian Indikator

Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 sebagaimana Perwal Nomor 9 Tahun 2023 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2024
1.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Disparbud	Nilai Hasil Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	78,00 (BB)
2.	Meningkatkan Nilai Sektor Jasa Pariwisata Kota Bekasi	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	Meningkatnya Pengembangan Potensi Pariwisata	Persentase Kawasan Wisata yang dikembangkan	4.76
			Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan yang datang ke kabupaten/kota ((Jumlah kunjungan wisatawan tahun N-Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun N-1)/Jumlah Kunjungan wisatawan tahun N-1)) X 100	10
				Rata - Rata Lama Menginap	2 malam

			Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Bekasi	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	9
				Persentase Sanggar Budaya yang dikembangkan	5

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Bekasi berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 119 Tahun 2021 Tugas pokok Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota

Bekasi antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pariwisata dan kebudayaan
2. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan pariwisata dan kebudayaan
3. Pengkoordinasian dalam rangka penyelenggaraan urusan pariwisata dan kebudayaan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Bekasi didalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Dinas yang mengelola perencanaan. Umum dan kepegawaian dan keuangan serta di dukung oleh bidang: pariwisata, pemasaran, kebudayaan dan Ekraf. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah;
2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis urusan pariwisata dan kebudayaan yang meliputi: bidang pariwisata, bidang pemasaran, bidang kebudayaan dan bidang pengembangan kesenian;
3. Mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis urusan pariwisata dan kebudayaan.

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISPARBUD) Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) dan dijelaskan melalui Peraturan Walikota Bekasi Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dina Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Bekasi melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri atas:

- a. Kepala Dinas, membawahkan:
- b. Sekretariat, membawahkan Sub Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
- c. Bidang Kepariwisataaan;
- d. Bidang Pemasaran Kepariwisataaan;
- e. Bidang Kebudayaan;
- f. Bidang Ekonomi Kreatif;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2021, pasal 4 ayat 1 menjelaskan bahwa Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang kepariwisataan, pemasaran, ekonomi kreatif serta pengembangan seni dan budaya.

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang –Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. pembinaan administrasi perkantoran;
- e. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
- f. pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
- g. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- h. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi yang berlokasi di kantor Pemerintah Kota Bekasi Gedung D Jl. Ahmad Yani No. 01 Bekasi, merupakan unit kerja pada Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat pada urusan kepariwisataan dan kebudayaan. Sebagai salah satu komponen pendukung pencapaian Indikator Kinerja Tujuan Pemerintah Kota Bekasi yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Indikator Kinerja Sasaran Tingkat Kota yaitu Presentase Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa, maka kontribusi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mewujudkan ketercapaian target kinerja Pemerintah tidak dapat dipungkiri keberadaanya.

Pengembangan sektor kepariwisataan di Kota Bekasi menghadapi berbagai tantangan, sebagai Kota Metropolitan dengan minimnya sumber daya alam, banyaknya permukiman serta pesatnya perdagangan komersial Kota Bekasi merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Provinsi Jawa Barat yang memiliki karakter sebagai destinasi wisata perkotaan yang ditopang oleh ketersediaan dan variasi produk wisata kota (urban tourism) seperti wisata rekreasi, wisata keluarga, wisata belanja, wisata sejarah ataupun wisata pendidikan dan budaya.

Namun disisi lain, perkembangan kepariwisataan dengan karakteristik tersebut juga menghadapi berbagai kendala dan permasalahan antara lain:

1. Bidang kebudayaan

Permasalahan yang seringkali dihadapi dalam upaya pengembangan sektor budaya di Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

- Belum optimalnya pemeliharaan dan perawatan cagar budaya yang dapat dikembangkan menjadi wisata sejarah;
- Belum maksimalnya pemanfaatan gedung kesenian sebagai tempat pertunjukan atau tempat berkarya dan berekspresi bagi para pelaku seni;
- Belum adanya museum sejarah perjuangan Kota Bekasi.

2. Bidang Kesenian

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pelestarian seni budaya Bekasi antara lain :

- Minimnya pembinaan terhadap sanggar seni tradisional di Kota Bekasi
- Masih minimnya even seni yang diselenggarakan baik di hotel maupun even lainnya
- Minimnya promosi kesenian Kota Bekasi ke luar daerah baik dalam maupun luar negeri
- Banyaknya sanggara yang alat keseniannya sudah rusak
- Belum optimalnya pemanfaatan gedung kesenian

3. Bidang Pariwisata

Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha kepariwisataan
- Masih terbatasnya peningkatan kompetensi SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Belum adanya wisata alam/buatan yang refresentatif

4. Bidang Pemasaran

Permasalahan yang dihadapi antara lain:

- Belum adanya wisata alam/buatan
- Kurangnya sarana dan parsarana promosi seni budaya dan pariwisata
- Objek wisata budaya kondisinya belum siap kunjung
- Belum adanya museum sejarah perjuangan Kota Bekasi

1.4 KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Terdiri dari 7 Kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 4) Admnistrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7) Pemeliharaan Barang Millik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Terdiri dari 3 kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
 - 2) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - 3) Pengelolaan Destinasi Pariwsata Kabupaten/Kota
3. Program Pemasaran Pariwisata
Terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
 - 1) Pemasaran pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
 - 1) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
5. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
Terdiri dari 2 kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
 - 2) Pengelolaan Cagar Budaya Peingkat Kabupaten/Kota
6. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
Terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
 - 1) Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Secara umum layanan urusan pariwisata dan urusan kebudayaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi terbagi dalam :

1. Bagian Sekretariat
2. Bidang Pariwisata
3. Bidang Pemasaran
4. Bidang Ekonomi Kreatif
5. Bidang Kebudayaan

Selain pelaksanaan program dan kegiatan sebagai upaya pencapaian kinerja tujuan dan sasaran, pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi meliputi Pemberian Rekomendasi Izin Hiburan Insidentil, Pelayanan Izin Haji/Umroh, Pelayanan Izin Penggunaan Gedung Kesenian dan Pelayanan Izin Penggunaan Gedung Creative Center.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta penyelenggaraan layanan dibutuhkan dukungan sumber daya antara lain sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini pegawai yang bekerja di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi serta dukungan sarana dan prasarana operasional kantor sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISPARBUD) sampai dengan bulan Desember tahun 2023 berjumlah 53 Orang terdiri dari 23 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 30 Tenaga Kontrak Kerja (TKK). Untuk mengoptimalkan pegawai secara kontinyu diberikan pembinaan dan pembagian tugas habis pekerjaan pada seluruh jajaran organisasi dan berusaha meningkatkan kinerja yang lebih baik agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang Kepariwisata dan Kebudayaan dapat berjalan merujuk pada pencapaian Renstra.

Adapun rincian dari sumber daya yang ada pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah :

Tabel 1.2 Data Pegawai ASN Berdasarkan Golongan

No.	Bagian/Bidang	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Sekretariat	-	3	5	1	9
2.	Pariwisata	-	2	3	0	5
3.	Kebudayaan	-	-	1	2	3
4.	Pemasaran	-	0	1	1	2
5.	Ekonomi Kreatif	-	1	1	2	4
J U M L A H		-	6	13	7	23

Sumber Bagian Umum dan Kepegawaian, 2024

Tabel 1.3 Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Bagian/ Bidang	PNS						TKK				Jum lah
		SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	SMA	D3	S1	S2	
1	Sekretariat	0	0	3	1	4	1	4	4	4	0	
2	Pariwisata	0	0	2	0	3	0	0	1	2		
3	Kebudayaan	0	0	0	0	2	1	0	0	4	0	
4	Pemasaran	0	0	0	0	1	1	4	1	2	0	

5	Ekonomi Kreatif	0	0	2	0	1	1	0	0	4	0	
	JUMLAH	0	0	7	1	11	4	8	6	16	0	

Sumber Bagian Umum dan Kepegawaian, 2024

Untuk mengoptimalkan peran serta kompetensi pegawai dalam pencapaian kinerja pelayanan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah memetakan kebutuhan personil teknis bidang pariwisata dan kebudayaan sebagai berikut :

Tabel 1.4 Data Kebutuhan Personil Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Berdasarkan Analisa Jabatan

No.	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Analisis Beban Kerja
1	Arsiparis Pertama	S1 di bidang manajemen perkantoran/ administrasi perkantoran/ tata perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
2	Pengelola Kegiatan dan Anggaran	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Akuntansi / Manajemen / Administrasi / Teknik Informatika / Manajemen Teknik Informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
3	Pengelola Usaha Pemasaran dan Promosi Wisata	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen Pariwisata / Pariwisata atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
4	Penyusun Rencana Promosi	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen/ Ekonomi/ Administrasi/ Psikologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan Kursus/Diklat	1
5	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Komunikasi/ Desain Komunikasi Visual atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
6	Pengelola Data	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Teknik Informatika/ Manajemen Informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	4

7	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	SLTA / DI / D-2 (Diploma-Dua) / D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen Perkantoran / Administrasi perkantoran / Tata Perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
8	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen/ Ekonomi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
9	Pemeriksa Kepariwisataa	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen Pariwisata / Pariwisata atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
10	Analisis Obyek Wisata	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen Pariwisata / Pariwisata atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
11	Penyuluh Wisata	a. S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma Empat) bidang Manajemen Pariwisata / Pariwisata atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
12	Analisis Pariwisata	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen Pariwisata/Pariwisata atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
13	Pengawas Kepariwisataa	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen Pariwisata /Pariwisata atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
14	Pengelola Data Eksplorasi Cagar Budaya	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen / Administrasi / Pemerintahan / Teknik Infomatika / Manajemen Teknik Infomatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
15	Juru Pelestari Cagar Budaya	SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan	1
16	Analisis Sumber Sejarah	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Sejarah/ Kajian Budaya/ Religi dan Budaya atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1

17	Penyusun Dokumentasi Sejarah dan Nilai Budaya	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Kajian Budaya/ Religi dan Budaya atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
18	Analisis Ekspresi Budaya Tradisional	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Kajian Budaya/ Religi dan Budaya atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
19	Pengelola Adat dan Kesenian	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Kajian Budaya/ Religi dan Budaya atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
20	Analisis Apresiasi Karya Seni	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Penciptaan Seni atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
21	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen Perkantoran/ Administrasi Perkantoran/ Tata Perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
22	Pamong Budaya Ahli Muda	Berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat ilmu sosial humaniora, agama, filsafat, ilmu seni, desain, dan media bagi Jabatan Fungsional kategori keahlian	2
23	Analisis Mutu Produk	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi Perdagangan / Manajemen / Administrasi Perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
24	Analisis Sarana Riset	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen / Pemerintahan / Akuntansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas ja	1

25	Pengembangan Sarana dan Prasarana	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Sipil / Planologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan Pendidikan dan Pelatihan	1
26	Penelaah Pengembangan Usaha	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen / Pemerintahan / Akuntansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
27	Pengelola Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil Mikro dan Menengah	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen / Administrasi / Pemerintahan / Teknik Infomatika / Manajemen	1
28	Analisis Ekonomi Kreatif	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat) bidang Akuntansi / Manajemen / Ekonomi Pembangunan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
29	Pengelola Hak Cipta dan Merek	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Administrasi / Manajemen atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.	1
30	Pengelola Hak Kekayaan Intelektual	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Administrasi / Manajemen atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
31	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	Sarjana (Diploma-IV) di bidang ilmu pariwisata, teknik industri, animasi, seni, ekonomi, manajemen, kewirausahaan, komunikasi, sejarah, sosial, hukum, arsitektur, desain, dan perencanaan wilayah dan kota atau bidang lainnya yang relevan dengan tugas jabatan sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina	1

Sumber Bagian Umum dan Kepegawaian, 2024

b. Sarana dan Prasarana

Tabel 1.5 Data Inventaris Kantor

No	Nama	Banyaknya	Tahun	Keterangan
1	Proyektor	3	2017	Baik
2	Kursi Pejabat Eselon IV	15	2017	Cukup Baik
3	Kursi Pejabat Eselon II	2	2017	Baik
4	Kursi Pejabat Eselon III	7	2017	Cukup Baik
5	Printer Hp Laserjet	6	2017	Baik
6	Note Book	6	2017	Cukup Baik
7	Komputer	13	2017	Cukup Baik
8	Sofa	3	2017	Baik
9	Kursi Biasa	22	2017	Baik
10	Mesin Absensi	1	2017	Baik
11	Alat Penghancur Kertas	1	2017	Baik
12	Lemari Kaca	1	2017	Baik
13	Filing Cabinet	28	2017	Cukup Baik
14	Lemari Besi	8	2017	Baik
15	Rak Penyimpanan	3	2017	Baik
16	Handphone	3	2016	Baik
17	Kursi Kerja Non Struktural	9	2016	Cukup Baik
18	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	3	2016	Cukup Baik
19	Meja Pegawai	42	2016	Cukup Baik
20	Sever	2	2016	Baik
21	Printer	3	2016	Cukup Baik
22	Laptop	4	2016	Cukup Baik
23	Scanner	1	2015	Baik
24	Rak Besi Metal	6	2015	Cukup Baik
25	Lemari Besi	2	2015	Baik
26	Mesin tik elektronik	1	2015	Baik
27	Kunci Khusus Engine	1	2015	Rusak Berat
28	Sound System	1	2014	Kurang Baik
29	Meja Pegawai Non Struktural	2	2014	Rusak Berat
30	Rak arsip	2	2014	Rusak Berat

31	Senar Drum	3	2007	2 Rusak ringan, 1 Rusak Berat
32	Kwarton Standar	1	2009	Rusak Berat
33	Bariton	1	2009	1 Rusak berat
34	Bendera Coulor Guard	1	2009	Rusak Berat
35	Stik Mayorette 150 cm	1	2009	Rusak Berat
36	Pakaian Seragam Marching drum	1	2009	Rusak Berat
37	Frenc Horn	2	2009	Rusak ringan
38	Fluegel Horn	3	2009	2 rusak ringan, 1 Rusak Berat
39	Melophone	1	2009	Rusak Ringan
40	Trumpet	6	2009	5 Rusak ringan, 1 Rusak Berat
41	Quintom	2	2009	Rusak Berat
42	Marching Bells	3	2009	Rusak Berat
43	Tuba	1	2009	Rusak Berat
44	Gitar Bass LA musik	1	2009	Rusak Berat

Sumber Bagian Umum dan Kepegawaian, 2024

Tabel 1.6 Data Aset Bangunan

No	Nama Bangunan	Tahun Pengadaan	Lokasi	Status Tanah	Penggunaan	Ket
1	Gedung Kesenian	2014	Situ Rawa Gede, Kel Bojong Menteng Kec. Rawalumbu	Milik negara	Sarana penyelenggaraan festival Seni dan Budaya	Gedung baru di serah terimakan dari DISPORBUD PAR ke DISPARBUD
2	Kawasan Wisata Kuliner	tahun 2015	Jl. Terusan Asrama Haji	Milik negara	Kawasan wisata kuliner	Terdapat 30 kios tenda untuk pedagang kuliner
3	Kawasan Wisata Kuliner Danau Duta Harapan	tahun 2017	Perumahan Duta Harapan	Milik negara	Kawasan wisata kuliner	Terdapat 20 kios untuk pedagang kuliner

Sumber Bagian Umum dan Kepegawaian, 2024

Pembangunan Gedung Kesenian H. Djaini yang berupa gedung kesenian yang telah dilaksanakan pembangunannya oleh Dinas perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kota Bekasi pada tahun 2022 merupakan implementasi dari Indikator Kinerja Sasaran pada RPJMD Kota Bekasi tahun 2013-2018 yaitu : Sarana Penyelenggaraan seni dan budaya yang representatif dengan target 1 gedung indoor.yang pada tahun 2022 telah di serah terima kan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi dan menjadi kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai pengguna. Dengan adanya serah terima maka gedung kesenian menjadi aset tetap Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yang berarti pemeliharaan selanjutnya menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Selanjutnya gedung kesenian untuk dapat digunakan diperlukan sarana dan prasarana seperti: alat alat kesenian, sound system, peralatan kantor meja, kursi, komputer, dan lain lain. Untuk pemeliharaanya dibutuhkan alokasi anggaran untuk petugas kebersihan yang di gaji tiap bulan oleh pemerintah daerah. Dilihat dari luasnya bangunan gedung kesenian diperlukan minimal 2 (dua) orang petugas kebersihan agar kebersihan gedung tetap terjaga dengan baik.

Kawasan Wisata Kuliner berlokasi di Jl. Terusan Asrama Haji didepan Apartemen Center Point Blok D, merupakan kawasan kuliner yang menggunakan tenda bongkar pasang dengan jumlah 30 (tiga puluh) buah. Konsep awal dibuatnya kawasan wisata kuliner adalah untuk menambah destinasi wisata di Kota Bekasi yang menyajikan makanan khas daerah walaupun pada akhirnya berkembang menjadi kawasan wisata kuliner yang menyajikan makanan khas daerah dan kuliner moderen. Kawasan Wisata Kuliner Duta Harapan ditetapkan sebagai kawasan wisata kuliner di Perumahan Duta Harapan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi bertujuan sebagai inisiatif untuk mengembangkan wisata danau Duta Harapan dengan pembangunan kawasan wisata kuliner.

Tabel 1.7 Data Aset Kendaraan Dinas

No	Merk/Type	No.Pol	Keterangan
1	Toyota Hilux	B 9010 KSL	KondisiBaik
2	Toyota KijangInnova	B 1313 KQN	KondisiBaik
3	Daihatsu Terios	B 1015 KQN	KondisiBaik
4	Daihatsu Xenia	B 1153 KQN	KondisiBaik
5	Daihatsu Xenia	B 1155 KQN	KondisiBaik
6	Daihatsu Terios	B 1009 KQN	KondisiBaik

Sumber Bagian Umum dan Kepegawaian, 2024

1.5 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi memiliki SOP yaitu: Bidang Kebudayaan:

1. SOP Pemeliharaan Cagar Budaya Kota Bekasi;
2. SOP Gelar Budaya Tingkat Kecamatan Kota Bekasi;
3. SOP Penerbitan Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Seni Budaya;
4. SOP Penerbitan Rekomendasi Operasional Sanggar Seni;
5. SOP Penerbitan Rekomendasi Penggunaan Gedung Kesenian;
6. SOP Pelaksanaan Kegiatan Festival dan Lomba Seni Budaya. Bidang Pariwisata:

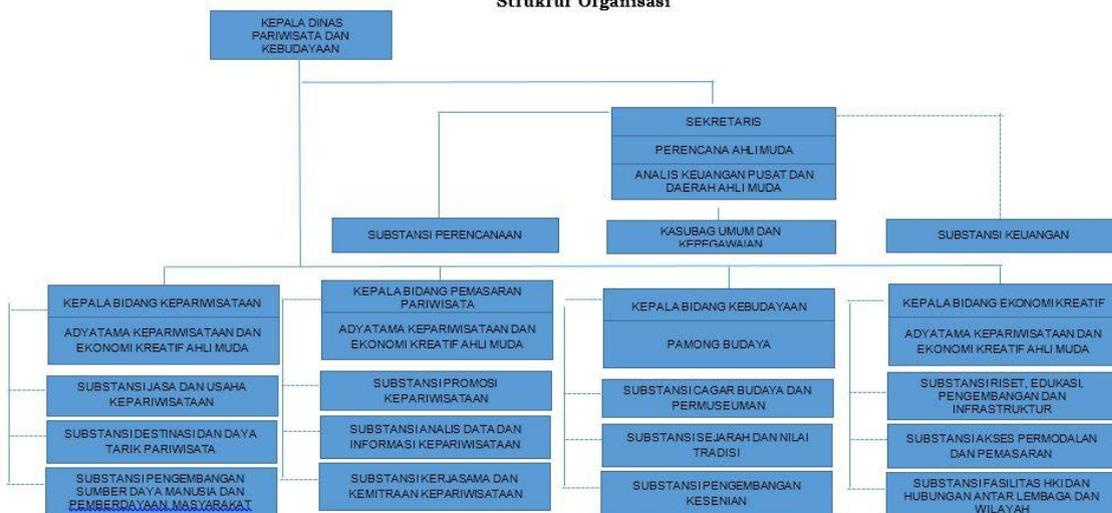
1. SOP Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Haji/Umroh;
2. SOP Penerbitan Surat Rekomendasi Hiburan Insidentil. Bidang Pemasaran:

1. SOP Pengumpulan dan Pengelolaan Data Pariwisata Seni dan Budaya;
2. SOP Pelaksanaan Promosi Pariwisata Seni dan Budaya;
3. SOP Penyusunan Laporan Rencana Kebutuhan Sarana Promosi Pariwisata Seni dan Budaya. Bidang Ekonomi Kreatif:

1. SOP Penerbitan Rekomendasi Penggunaan Gedung Bekasi Creative Center.

Struktur Organisasi Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 119 Tahun 2021 adalah sebagaimana gambar berikut :

Gambar 1
Struktur Organisasi



1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian LKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2023 mengacup kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Kontrak Perjanjian Tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A.

Capaian Kinerja Organisasi

Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi secara umum

B. Analisis Capaian indikator Kinerja utama

Bab ini menyajikan capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan tercapainya kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

C. Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan pernyataan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang ada. Analisa terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

2.1 Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026

Sebagai wujud komitmen Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi dalam mendukung tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan pada Perwal Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yaitu:

1. Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Dinamis dan Akuntabel.
Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah
2. Tujuan : Terwujudnya Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota
Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi sektor perdagangan jasa dan industri serta iklim usaha berbasis pengalaman (kreatif dan investasi).

2.2 Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2024-2026 disusun mengacu pada Perwal Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Disparbud
2. Meningkatkan Nilai Sektor Jasa Pariwisata Kota Bekasi

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (*targetnya*) masing-masing yang diharapkan dapat tercapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan.

Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja
2. Meningkatnya pengembangan potensi Pariwisata
3. Meningkatnya kunjungan wisatawan
4. Meningkatnya pengembangan dan pelestarian seni budaya Bekasi

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2024
1.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Disparbud	Nilai Hasil Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	78,00 (BB)
2.	Meningkatkan Nilai Sektor Jasa Pariwisata Kota Bekasi	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	Meningkatnya Pengembangan Potensi Pariwisata	Persentase Kawasan Wisata yang dikembangkan	4.76
			Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan yang datang ke kabupaten/kota ((Jumlah kunjungan wisatawan tahun N-Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun N-1)/Jumlah Kunjungan wisatawan tahun N-1)) X 100	10
				Rata - Rata Lama Menginap	2 malam
			Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Bekasi	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	9
				Persentase Sanggar Budaya yang dikembangkan	5

2.3 Perjanjian Kinerja

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah selain itu dapat pula digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2024 merupakan target kinerja dari Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2024-2026, yang memuat sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi.

Berikut adalah sasaran kinerja, indikator dan target yang akan dicapai dalam Perjanjian Kinerja beserta Alokasi Anggaran sebagai berikut

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

N0	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	nilai	78 (BB)
2	Meningkatnya pengembangan potensi Pariwisata	Persentase kawasan wisata yang dikembangkan	%	4,76
3	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	10
		Rata-Rata Lama Menginap	malam	2
2	Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Bekasi	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	9
		Persentase Sanggar Budaya yang dikembangkan	%	5

Adapun dalam pencapaian target sasaran tersebut, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi menjalankan program sebagai berikut :

Program	Anggaran	Keterangan
1.Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.479.950.786	APBD Perubahan
2.Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.305.703.523	APBD Perubahan
3.Program Pemasaran Pariwisata	489.890.000	APBD Perubahan
4.Program Pengembangan Simber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	456.700.000	APBD Perubahan
5.Program Pengembangan Kesenian Tradisional	303.320.000	APBD Perubahan
6. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	400.000.000	APBD Perubahan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi, yang tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah.

Pengukuran Kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi yang dilaksanakan Tahun 2024. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data capaian kinerja dari setiap indikator.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja yang telah dicapai Dinas Pariwisata dan budayaan Kota Bekasi selama tahun 2024, berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi tahun 2024-2026 serta perjanjian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi tahun 2024 sebanyak 4 (empat) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja yang semua indikatornya mencapai target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa pengukuran capaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Persentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang makin baik. Perhitungan persentase pencapaian target dalam Penetapan Kinerja Sasaran memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

Semakin tinggi realisasi menunjukkan **pencapaian kinerja yang semakin baik**, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Berdasarkan pedoman di atas, pencapaian target kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2024 diukur dengan membandingkan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasinya dalam perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi dengan Wali Kota Bekasi. Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 4 (empat) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi tahun 2024-2026.

1. Sasaran I : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

Nilai kualitas dan akuntabilitas sangat penting diadopsi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa eksistensi atau keberadaan sebuah pemerintah, bergantung pada penerima layanan. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bagi penyelenggara pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik dan bertanggung jawab.

Untuk mendukung sasaran strategis pertama yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja maka indikator sasaran Nilai AKIP diperoleh hasil Indikator Nilai Evaluasi Akip pada tahun 2024 terealisasi sebesar 70,03(BB), dari target yang telah ditetapkan sebesar 78,00(BB) artinya target nilai tidak tercapai walaupun secara kategori masih tercapai. sehingga capaian yang diperoleh hanya sebesar 89,78% sebagaimana tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja

Capaian Indikator Kerja Sasaran	Satuan	TAHUN 2024		Capaian %
		Target	Realisasi	
Nilai AKIP	Persen	78	70,03	89.78%

Sumber: Bagian Sekretariat Disparbud

Hasil pengukuran di atas diperoleh berdasarkan hasil pengukuran terhadap 4 komponen penilaian, yang terdiri dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 700.1.2.1/037-LHE/ITKO.Set pada tanggal 04 juli Tahun 2024.

Adapun hasil pengukuran dari ke 4 (empat) komponen tersebut dijabarkan pada tabel di bawah ini:

No	Komponen Yang Dinilai	2024	
		Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	20,99
b.	Pengukuran Kinerja	30	20,98
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,56
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,50
	Nilai Hasil Evaluasi	100	70,03
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Tabel 3. 2 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja “ Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi Kinerja 2023	Realisasi Kinerja 2024
1	Nilai AKIP	Nilai	78	67,78	70,03

Sumber : Sub Bagian Perencanaan

Apabila disandingkan capaian Nilai AKIP Tahun 2024 dengan 2023 dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan perolehan nilai walau belum bisa mencapai target yang diharapkan.

Tabel 3. 3 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja “ Nilai AKIP “ dengan Target Akhir Renstra 2024-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi Kinerja 2024	Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Renstra
1	Nilai AKIP	Nilai	78	70.03	72	97,26%

Sumber : Sub Bagian Perencanaan

Berdasarkan tabel diatas, bahwa perbandingan indikator kinerja tahun 2024 dengan target akhir kinerja Renstra 2024 – 2026 pencapaiannya masih belum tercapai. Adapun penyebab ketidak tercapaian adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya sinergitas dan kerjasama antar Tim Penyusun LKIP
2. Keterbatasan SDM Bagian Perencanaan
3. Kurangnya kompetensi SDM Perencanaan
4. Kurangnya pengawasan pimpinan terhadap kinerja Tim penyusun

Kedepan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi berkomitmen untuk menindaklanjuti hal tersebut dengan melakukan evaluasi terhadap proses penyusunan LKIP dan meningkatkan kompetensi SDM melalui Bimbingan Teknis.

2. Sasaran II : Meningkatnya pengembangan potensi pariwisata

Penetapan sasaran didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2024-2026, dengan indikator kinerja “ Persentase kawasan wisata yang dikembangkan”. Adapun capaian indikator kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya pengembangan potensi Pariwisata

Capaian Indikator Kerja Sasaran	Satuan	TAHUN 2024		Capaian %
		Target	Realisasi	
Persentase Kawasan Wisata yang dikembangkan	Persen	4,76	5	105%

Sumber: Bagian Sekretariat Disparbud

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian dari indikator sasaran Meningkatnya pengembangan potensi pariwisata didukung oleh indikator kinerja Persentase Kawasan Wisata yang dikembangkan, dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan. Perhitungan tersebut didapat dari perbandingan antara jumlah kawasan wisata yang ditata dibandingkan dengan target jumlah kawasan yang direncanakan untuk dikembangkan , adapun kawasan wisata yang ditata pada tahun 2024 adalah sebanyak 3 kawasan sedangkan keseluruhan kawasan wisata yang direncanakan akan ditata adalah sebanyak 60 kawasan yang merupakan jumlah potensi pariwisata di Kota Bekasi. Kawasan wisata yang ditata adalah: **Kota Lama, Kampung Bali dan Kota Baru** sedangkan untuk tahap kajian pengembangan selanjutnya yang telah dibuatkan DED adalah **Kampung Sasak dan Danau Duta Harapan**.

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja “ Meningkatnya pengembangan potensi pariwisata dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi Kinerja 2023	Realisasi Kinerja 2024
1	Persentase Kawasan Wisata yang dikembangkan	Persen	4,76	40	5

Sumber : Sub Bagian Perencanaan

Berdasarkan perbandingan dengan tahun lalu terdapat perbedaan dasar perhitungan dalam menentukan persentase kawasan wisata yang dikembangkan dimana pada perencanaan target pada tahun 2023 merupakan bagian dari perencanaan yang didasarkan pada Dokumen Renstra Tahun 2018 – 2023, dimana rencana target terbagi dalam jangka waktu 5 tahun dengan besaran 20% setiap

tahunnya atau sebanuak 1 lokasi kawasan wisata yang dikembangkan. Dari besaran target tersebut bila diakumulasi sampai dengan tahun terakhir renstra menjadi maka diharapkan dapat tercapai target sebesar 100% yang dikonversikan sebanyak 5 lokasi. Dari hasil evaluasi internal pola perhitungan tersebut tidak secara jelas menggambarkan kondisi target yang seharusnya menjadi capaian kinerja Disparbud, karena penentuan besaran 20 % hanya berdasarkan pada jumlah target 5 lokasi dengan tidak disebutkan apakah lokasi tersebut adalah lokasi yang sama atau berbeda.

Sehingga sebagai upaya perbaikan target agar menjadi lebih jelas dan terukur maka target tersebut kemudian di tetapkan berdasarkan jumlah potensi wisata yang dimiliki/terdata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi sebanyak 60 obyek. Untuk kemudian menjadi dasar dalam penentuan target kinerja selanjutnya pada dokumen perencanaan tahun 2024-2026.

Untuk itu pada perencanaan tahun 2024, perencanaan target pada Renstra RPD Tahun 2024-2026 menggunakan rumusan perhitungan target persentase kawasan wisata yang dikembangkan dari jumlah potensi obyek wisata yang ada di Kota Bekasi dengan rencana target per tahunnya dirumuskan dari perbandingan jumlah target kawasan yang dikembangkan dengan jumlah potensi obyek wisata yang terdata sebanyak 60 obyek potensi wisata. Dari hasil pertimbangan penganggaran, didapat target per tahun dari 2024-2026 adalah sebanyak 2 lokasi kawasan wisata yang dikembangkan dari jumlah total potensi obyek wisata yang terdata. Adapun pada hasil pelaksanaan program dan kegiatan Disparbud di tahun 2024 kawasan wisata yang dapat dikembangkan adalah sebesar 3 lokasi sehingga terdapat peningkatan persentase kawasan wisata dari tahun sebelumnya yaitu 2 lokasi. Maka untuk persamaan penyandingan dalam menghitung perbandingan maka pada tahun 2023 dengan 2 kawasan wisata yang dikembangkan dari total 60 kawasan wisata yang menjadi target jumlah kawasan yang direncanakan untuk dikembangkan maka angka capaian pada tahun 2023 adalah 3,33 persen lebih rendah dari tahun 2024 dimana ada 3 lokasi kawasan yang dikembangkan dari 60 kawasan wisata atau sebesar 5 % yaitu **Kota Lama, Kampung Bali dan Kota Baru.**

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Meningkatkan pengembangan potensi pariwisata“ dengan Target Akhir Renstra 2024-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi Kinerja 2024	Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Renstra
1	Persentase Kawasan Wisata yang dikembangkan	Persen	4,76	5	4,76	105%

Sumber : Sub Bagian Perencanaan

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024 realisasi Persentase Kawasan Wisata yang dikembangkan telah melampaui target akhir renstra sebesar 5 % dari target 4,76% di tahun 2024 dengan capaian sebesar 105%. Realisasi didapat dari perbandingan jumlah kawasan wisata yang dikembangkan dengan jumlah total potensi wisata yang dimiliki Kota Bekasi. Dimana

dari total 60 potensi wisata di Kota Bekasi masih terdapat 57 potensi wisata yang masih harus dikembangkan.

Adapun beberapa kendala yang dihadapi adalah :

1. Keterbatasan anggaran program dan kegiatan
2. Masih belum tersinerginya perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal dan tingkat kota
3. Belum adanya kebijakan dan aturan teknis dan operasional terkait penataan dan pengembangan kawasan wisata

Sehingga untuk selanjutnya masih diperlukan peningkatan kinerja program pendukung indikator Persentase Kawasan Wisata yang dikembangkan yaitu program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata.

3. Sasaran III: Meningkatnya Kunjungan Wisatawan

Penetapan sasaran didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2024-2026, dengan indikator kinerja “1. Persentase peningkatan kunjungan wisatawan” dan indikator kinerja 2. “Rata –Rata Lama Menginap”

Penjelasan capaian kinerja untuk indikator kinerja “1. Persentase peningkatan kunjungan wisatawan” adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kunjungan Wisatawan

Capaian Indikator Kerja Sasaran	Satuan	TAHUN 2024		Capaian %
		Target	Realisasi	
1. Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	Persen	10	95,35	953%

Sumber: Bagian Sekretariat Disparbud

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian dari indikator sasaran Meningkatnya Kunjungan Wisatawan didukung oleh indikator kinerja Persentase peningkatan kunjungan wisatawan, dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan. Perhitungan tersebut didapat dari persentase kenaikan antara jumlah wisatawan tahun 2024 dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2023, adapun jumlah kunjungan wisatawan tahun 2024 adalah sebanyak 2.490.665 orang sedangkan tahun 2023 adalah sebanyak 1.274.929 orang dengan jumlah peningkatan kunjungan sebanyak 1.215.736 orang yang apabila dipersentasekan menurut rumus kenaikan didapat sebanyak 95,35 % peningkatan jumlah kunjungan dengan capaian 953%. Dengan rumus perhitungan menggunakan rumus peningkatan/pertambahan yang di persentasekan kenaikannya dibanding tahun

sebelumnya.

$$\text{“ Persentase peningkatan = [(jumlah kunjungan tahun n – jumlah kunjungan th.n-1) / jumlah kunjungan tahun n-1]x 100”}$$

Peningkatan yang sangat signifikan ini berkaitan dengan perbaikan monitoring ke seluruh pelaku usaha pariwisata serta pelaksanaan inventrisasi data kepariwisataan yang dilakukan oleh internal Disparbud sehingga untuk tahun data kunjungan wisatawan di Kota Bekasi diambil dari jumlah kunjungan tidak hanya di destinasi atau objek wisata buatan tetapi juga akomodasi dan jasa wisata lainnya termasuk kunjungan pada event atau acara di Kota Bekasi yang disesuaikan dengan karakteristik wisata Kota Bekasi yaitu wisata perkotaan (*urban tourism*). Berikut tabel kunjungan wisata yang berhasil diinventarisir oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi sampai dengan 31 Desember 2024.

Gambar 1

JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN
KOTA BEKASI TAHUN 2024

NO	BULAN	KUNJUNGAN WISATAWAN				TOTAL	KET
		DESTINASI		AKOMODASI			
		PARIWISATA	EKRAF	WNI	WNA		
1	JANUARI	134,103	-	51,406	1,094	186,603	
2	FEBRUARI	222,397	325	45,872	1,131	269,725	
3	MARET	141,095	90	83,121	2,036	226,342	
	TW. 1	497,595	415	180,399	4,261	682,670	
4	APRIL	176,830	165	66,321	1,247	244,563	
5	MEI	173,025	380	59,615	1,569	234,589	
6	JUNI	159,059	610	67,764	1,783	229,216	
	TW. 2	508,914	1,155	193,700	4,599	708,368	
7	JULI	152,490	235	62,904	6,710	222,339	
8	AGUSTUS	117,350	430	58,134	1,688	177,602	
9	SEPTEMBER	96,348	200	61,229	4,850	162,627	
	TW. 3	366,188	865	182,267	13,248	562,568	
10	OKTOBER	119,181	-	57,440	1,633	178,254	
11	NOVEMBER	127,632	150	57,745	1,228	186,755	
12	DESEMBER	156,480	260	14,656	654	172,050	
	TW. 4	403,293	410	129,841	3,515	537,059	
	TOTAL	1,775,990	2,845	686,207	25,623	2,490,665	

Sumber: Sub Bagian Perencanaan

Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja “Meningkatnya Kunjungan Wisatawan dengan Tahun Sebelumnya”

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi Kinerja 2023	Realisasi Kinerja 2024
1	Persentase peningkatan	Persen	10	2,44 %	10

	kunjungan wisatawan				
--	---------------------	--	--	--	--

Sumber: Sub Bagian Perencanaan

Berdasarkan perbandingan dengan tahun lalu terdapat peningkatan persentase Persentase peningkatan kunjungan wisatawan, dimana pada tahun 2023 terdapat 1.274.929 wisatawan dengan perbandingan tahun 2024 sebanyak 2.490/665 atau naik sekitar 95,35 persen lebih tinggi dari tahun 2023 dimana ada peningkatan kunjungan sebanyak 1.215.736 orang.

Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja “Meningkatnya Kunjungan Wisatawan” dengan Target Akhir Renstra 2024-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi Kinerja 2024	Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Renstra
1	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	Persen	10	95,35	10	950%

Sumber: Sub Bagian Perencanaan

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024 capaian yang diraih 950 persen dari target akhir Renstra sebesar 100 % akan tetapi kenaikan tersebut harus memperhitungkan tahun terakhir capaian renstra yaitu tahun 2026 yang telah dibandingkan dengan tahun 2025

Adapun beberapa kendala yang dihadapi adalah:

1. Keterbatasan anggaran program dan kegiatan
2. Masih belum tersinerginya perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal dan tingkat kota
3. Belum adanya kebijakan dan aturan teknis dan operasional terkait metode pemasaran dan promosi yang tepat

Sehingga untuk selanjutnya masih diperlukan peningkatan kinerja program pendukung indikator Persentase peningkatan kunjungan wisatawan yaitu program pemasaran pariwisata.

Penjelasan capaian kinerja untuk indikator kinerja “2. Rata- rata lama menginap” adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kunjungan Wisatawan

Capaian Indikator Kerja Sasaran	Satuan	TAHUN 2024	
		Target	Realisasi

2. Rata – rata lama menginap	malam	2	2	100%
------------------------------	-------	---	---	------

Sumber: Data Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan laporan Berita Statistik Resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 21/10/3275/Th.XXV, 1 Oktober 2024 (terlampir) didapat data rata- rata lama menginap pada Agustus 2024 adalah 2 malam sehingga sebagaimana dijelaskan dalam tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian dari indikator sasaran Meningkatkan Kunjungan Wisatawan didukung oleh indikator kinerja “Rata- Rata Lama Menginap”, dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 2 malam .

Tabel 3.11 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja “Meningkatnya Kunjungan Wisatawan dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi Kinerja 2023	Reaisasi Kinerja 2024
1	Rata – rata lama menginap	malam	2	2	2

Sumber: Sub Bagian Perencanaan

Berdasarkan perbandingan dengan tahun lalu indikator Rata Rata Lama Menginap masih dapat dipertahankan sebanyak 2 malam (sebagai terlampir).

Tabel 3.12 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja “Meningkatnya Kunjungan Wisatawan” dengan Target Akhir Renstra 2024-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi Kinerja 2024	Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Renstra
1	Rata – rata lama menginap	malam	2	2	2	100%

Sumber: Sub Bagian Perencanaan

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024 capaian yang diraih 100 persen dari target akhir Renstra sebesar 100 % untuk itu tetap harus diperhitungkan kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan penurunan pada target.

Adapun beberapa kendala yang dihadapi adalah :

1. Ketidakpastian kondisi wilayah baik alam , keamanan dan ketertiban serta ekonomi masyarakat

2. Belum adanya terobosan dalam inovasi terkait pariwisata di sektor ekonomi kreatif

3. Belum adanya kebijakan dan aturan teknis dan operasional terkait pengembangan ekonomi kreatif yang mendukung kepariwisataan di Kota Bekasi

Sehingga untuk selanjutnya masih diperlukan peningkatan kinerja program pendukung indikator Persentase peningkatan kunjungan wisatawan yaitu program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif

4. Sasaran IV: Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Bekasi

Penetapan sasaran didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2024-2026, dengan indikator kinerja “1. Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan”.

Dan indikator kinerja 2 “Persentase sanggar budaya yang dikembangkan” Adapun capaian indikator kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.13 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Bekasi

Capaian Indikator Kerja Sasaran	Satuan	TAHUN 2024		
		Target	Realisasi	
1. Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Persen	9	9,37	104%

Sumber: Bidang Kebudayaan Disparbud

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian dari indikator sasaran Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Bekasi didukung oleh indikator kinerja . 1. Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan. Perhitungan tersebut didapat dari persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan tahun 2024 sebanyak 6 dibandingkan dengan jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki Kota Bekasi sebanyak 64 , apabila dipersentasekan adalah sebesar 9,37%. Adapun 6 lokasi yang terealisasi adalah 2 lokasi ditetapkan yaitu Swiker Molen, Makam M.Hasibuan dan 4 lokasi dipelihara yaitu Sela Miring (Kranggan), Makam Mbah Raden (Jati Murni), Sumur Bandung (Jati Raden), Sumur Batu (Bantar Gebang). Dari 6 lokasi ini masih terdapat 58 lokasi yang belum difasilitasi oleh anggaran sehingga ke depan menjadi catatan bagi Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk dapat dianggarkan di tahun selanjutnya.

Tabel 3.14 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja “ Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Bekasi dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi Kinerja 2023	Realisasi Kinerja 2024
1	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Persen	9	6	9,37

Sumber : Sub Bagian Perencanaan

Berdasarkan perbandingan dengan tahun lalu terdapat peningkatan Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, dimana pada tahun 2023 terdapat benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan atau sebanyak 4 atau sebesar 6 persen dari total 64 benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki dengan perbandingan tahun 2024 sebanyak 6 benda, situs dan kawasan cagar budaya dari 64 yang dimiliki atau sebesar 9,37 % naik sekitar 3,77 persen dari tahun 2023.

Tabel 3.15. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja “ Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Bekasi “ dengan Target Akhir Renstra 2024-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi Kinerja 2024	Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Renstra
1	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Persen	9	9,37	9	104%

Sumber : Sub Bagian Perencanaan

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024 capaian yang diraih 104 persen bila dibandingkan dari target akhir Renstra sebesar 9 %. Capaian secara nilai tercapai melebihi target akhir renstra, akan tetapi masih terdapat 58 benda, situs dan kawasan cagar budaya lainnya yang belum di pelihara dan dilestarikan.

Adapun beberapa kendala yang dihadapi adalah :

1. Keterbatasan anggaran program dan kegiatan
2. Keterbatasan SDM Bidang Kebudayaan
3. Belum adanya kebijakan dan aturan teknis dan operasional terkait pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan kearifan lokal daerah

Sehingga untuk selanjutnya masih diperlukan peningkatan kinerja program pendukung inidkator Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya.

Tabel 3.16 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Bekasi

Capaian Indikator Kerja Sasaran	Satuan	TAHUN 2024		
		Target	Realisasi	
2. Persentase sanggar budaya yang dikembangkan	Persen	5	5	100%

Sumber: Bidang Kebudayaan Disparbud

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian dari indikatr sasaran Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Bekasi didukung oleh indikator kinerja . 2. Persentase sanggar budaya yang dikembangkan dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan. Perhitungan tersebut didapat dari Persentase sanggar budaya yang dikembangkan tahun 2024 sebanyak 5 lembaga dibandingkan dengan jumlah Persentase sanggar budaya yang dimiliki Kota Bekasi sebanyak 100 sanggar aktif , apabila dipersentasekan adalah sebesar 5%. Adapun 5 lembaga tersebut adalah Sanggar Maulina, sanggal Seli Asih, Sanggar Asafitrim Sanggar Kreasi Puspita dan Sanggar Mekar Pasundan. Artinya masih ada 95 sanggar aktif yang belum dapat difasilitasi dalam anggaran sehingga pada dapat dimasukkan pada perencanaan dan penganggaran di tahun berikutnya.

Tabel 3.17 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja “Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Bekasi dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi Kinerja 2023	Reaisasi Kinerja 2024
1	Persentase sanggar budaya yang dikembangkan	Persen	5	5	5

Sumber : Sub Bagian Perencanaan

Berdasarkan perbandingan dengan tahun lalu terdapat peningkatan Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, dimana pada tahun 2023 terdapat Persentase sanggar budaya yang dikembangkan atau sebanyak 5 atau sebesar 5 persen dari total 100 sanggar budaya yang dikembangkan yang dimiliki dengan perbandingan tahun 2024 sebanyak 5 sanggar budaya yang dikembangkan dari 100 yang dimiliki atau sebesar 5 % masih sama dengan tahun 2023.

Tabel 3.18 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja “ Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Bekasi “ dengan Target Akhir Renstra 2024-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi Kinerja 2024	Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Renstra
1	Persentase sanggar budaya yang dikembangkan	Persen	5	5	7	71,42%

Sumber : Sub Bagian Perencanaan

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024 capaian yang diraih 71,42 persen bila dibandingkan dari target akhir Renstra sebesar 7 %.

Adapun beberapa kendala yang dihadapi adalah :

1. Keterbatasan anggaran program dan kegiatan
2. Keterbatasan SDM Bidang Kebudayaan
3. Belum adanya kebijakan dan aturan teknis dan operasional terkait pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan kearifan lokal daerah

Sehingga untuk selanjutnya masih diperlukan peningkatan kinerja program pendukung indikator Persentase sanggar budaya yang dikembangkan.

3.2 Analisis atau Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), Ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi turut ambil peran dalam mendukung reformasi birokrasi nasional yaitu dengan melakukan peningkatan pelayanan dan tata kelola urusan pariwisata dan urusan kebudayaan.

a. Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data existing pegawai per tanggal 31 Desember 2024, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan didukung oleh 53 orang Pegawai , yang terdiri dari 23 orang ASN dan 30 Non ASN, yang melayani 3893 sektor usaha jasa pariwisata yang terdaftar serta 1713 pelaku usaha ekonomi kreatif dan 100 sanggar aktif belum termasuk jumlah pelaku seni dan budaya di 12 wilayah kecamatan maka terdapat keterbatasan SDM yang sangat tinggi. Sehingga sangat riskan terjadi kurang maksimal nya penyediaan layanan terhadap stake holder di bidang pariwisata dan kebudayaan.

3.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Efisiensi dalam pengelolaan anggaran mengacu pada kemampuan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin. Ini berarti mengurangi pemborosan, baik dalam bentuk pengeluaran yang tidak perlu maupun dalam bentuk alokasi sumber daya yang tidak optimal. Efisiensi bukan hanya soal menghemat uang, tetapi juga tentang menggunakan anggaran secara

strategis untuk menciptakan dampak yang maksimal. Dalam rangka mencapai target sasaran di Tahun 2024, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi, melaksanakan 6 program, 16 kegiatan dan 32 sub kegiatan dengan total anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 14.435.564.309,- dengan sumber dana dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dari dana DBCHT dari pagu murni sebesar Rp. 14.726.756.373 atau terdapat pengurangan pagu sebesar 206.700.000 yang disebabkan oleh terjadinya penyesuaian terhadap sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Berdasarkan data realisasi keuangan sampai dengan 30 Desember 2024, terdapat realisasi anggaran sebesar Rp. 12.995.839.860 atau sebesar 90.03% dari total anggaran. Dengan efisiensi sebesar 9,07% atau sebesar Rp. 1,438.724.449,-.

3.4 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2024, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi didukung oleh 6 Program, 16 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Terdiri dari 7 Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Terdiri dari 3 kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
 - 2) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - 3) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
3. Program Pemasaran Pariwisata
Terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
 - 1) Pemasaran pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
 - 1) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
5. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
Terdiri dari 2 kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
 - 2) Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
6. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
Terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
 - 1) Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 3.19 analisis Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Program /Kegiatan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
I		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	11.479.950.786	100	94,92
	Nilai AKIP					
		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	15.000.000	100	93,33
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	7.721059.000	100	84,09
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	80.000.000	100	99,15
		Admnistrasi Umum Perangkat Daerah	100	607.800.000	100	94,41
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	159.956.000	100	95,06
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	2.360.051.536	100	95,87
		Pemeliharaan Barang Millik Daerah Penunjang Urusan	100	536.084.250	100	96,89

		Pemerintahan Daerah				
II		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100	1.305.703.523	100	97,67
	Persentase Kawasan Wisata yang dikembangkan					
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	100	459.690.493	100	98,63
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	100	150.000.000	100	95,03
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	100	400.000.000	100	98,54
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	100	296.013.030	100	96,33
III		Program Pemasaran Pariwisata	100	489,890,000	100	98,42
	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan					
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	100	489.890.000	100	98,42

IV		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	100	456.700.000	100	98,47
	Rata – rata lama menginap					
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	100	456.700.000	100	98,47
V		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	100	400.000.000	100	98,64
	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan					
		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100	100.000.000	100	98,00
		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100	150.000.000	100	98,85
VI		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	100	303.320.000	100	99,15
	Persentase sanggar budaya yang dikembangkan					
		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	303.320.000	100	99,15

Sumber : Sub.Bagian Keuangan

Dari tabel tersebut dapat digambarkan bahwa terdapat efisiensi pada semua program dan kegiatan dengan total efisiensi sebesar 9,07%. Tingkat efisiensi tertinggi terdapat pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan nilai efisiensi 5,08 yang disebabkan oleh pengurangan anggaran pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dari pagu murni Rp 8.206.059.000,- menjadi Rp. 7.706.059.000,- atau pengurangan sekitar Rp. 500.000.000,- dan penambahan pada Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pagu murni 2.237.899.600,- menjadi Rp. 2.240.051.536,- atau penambahan sebesar Rp.2.151.936,-

Pengurangan pagu anggaran sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN disebabkan karena perpindahan/mutasi pegawai, sedangkan penyesuaian anggaran pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor disebabkan oleh penambahan anggaran BPJS Kesehatan yang pada pagu murni masih terdapat kekurangan anggaran belanja.

Tingkat efisiensi terendah terdapat pada Program Pengembangan Kesenian Tradisional dengan tingkat efisiensi sebesar 0,85 dimana dari total anggaran yang tersedia terealisasi sebesar 99,15%. Adapun keterkaitan antara tingkat efisiensi terhadap capaian target indikator sasaran adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah	28 Dokumen	28 Dokumen
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	12 laporan	12 laporan
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis dan jumlah komponen instalas	19 jenis	19 jenis
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis dan Jumlah Barang yg dicetak dan digandakan	20614 lembar	20614 lembar
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang Undangan	Jenis dan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	60 jenis	60 jenis
6	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan rapat konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan
7	Pengelolaan Surat menyurat dan Naskah Dinas Lainnya	Jumlah surat masuk dan surat keluar dan naskah dinas lainnya	1800 dokumen	1800 dokumen

8	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Rekening jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik setiap bulan	36 laporan	36 laporan
9	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah SDM Kebersihan yang terbayar, jumlah SDM Non ASN dan jenis administrasi keuangan	12 laporan	12 laporan
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	7 unit	7 unit
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara	2 unit	2 unit
12	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah dokumen capaian dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah	6 dokumen	6 dokumen
13	Penyusunan pelaporan dan analisa prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen laporan keuangan	4 dokumen	4 dokumen
14	Pelaksanaan administrasi kepegawaian	Jumlah administrasi kepegawaian yang terlayani	12 laporan	12 laporan
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik Kantor	6 paket	6 paket
16	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar	864 orang	864 orang
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	40 unit	40 unit
18	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu	12 laporan	12 laporan

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Terlaksananya program peningkatan daya tarik destinasi wisata	Jumlah kawasan yang ditata	1 lokasi	1 lokasi
2	Terlaksananya penyelenggaraan penunjang urusan bidang pariwisata	Tersusunnya hasil perumusan kebijakan teknis urusan	1 dokumen	1 dokumen

		pelaksanaan kepariwisataan		
		Jumlah laporan hasil pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata	1 laporan	1 laporan
		Jumlah laporan hasil pembeinaan dan pengawasan pelaku usaha pariwisata	12 laporan	12 laporan
		Jumlah laporan pemberdayaan masyarakat pariwisata	1 laporan	1 laporan

Program Pemasaran Kepariwisata

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Terlaksananya program pemasaran kepariwisataan	Jumlah kunjungan wisatawan	951.286 orang	2.490.665 orang
2	Terlaksananya penunjang kegiatan pemasaran kepariwisataan	Promosi kepariwisataan	12 laporan	12 laporan
		Analisis Data Kepariwisata dan Informasi Kepariwisata	12 laporan	19 jenis
		Kerjasama dan kemitraan kepariwisataan	12 laporan	12 laporan

Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional	Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan (ditingkatkan kompetensinya)	45 orang	45 orang
		Jumlah sanggar budaya yang dikembangkan	5 lembaga	5 lembaga
2	Penetapan cagar budaya	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	6 situs	6 situs
		Jumlah obyek cagar budaya yang ditetapkan	2 objek	2 objek

Standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan	Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mengikuti proses standardisasi	25 sertifikat	25 sertifikat
Peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional	Jumlah Lembaga kesenian tradisional yang ditingkatkan kapasitasnya	5 lembaga	5 lembaga
Menyusun laporan perlindungan pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan kesenian tradisional	Jumlah cagar budaya dan kesenian tradisional yang dikembangkan dan pembinaan	12 laporan	12 laporan

3.5 Realisasi Anggaran

Berikut ini disajikan informasi komposisi realisasi anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.20 Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2024

No	Program /Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.479.950.786	10.093.444.649	94,92
	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	15.000.000	13.999.800	93,33
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.721059.000	6.492.314.900	84,09
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80.000.000	79.320.000	99,15
	Admnistrasi Umum Perangkat Daerah	607.800.000	573.813.462	94,41
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	159.956.000	152.060.000	95,06
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.360.051.536	2.262.542.266	95,87
	Pemeliharaan Barang Millik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	536.084.250	519.393.862	96,89

II	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.305.703.523	1.275.253.720	97,67
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	459.690.493	453.399.720	98,63
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	150.000.000	142.550.000	95,03
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	400.000.000	394.140.600	98,54
	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	296.013.030	285.163.400	96,33
III	Program Pemasaran Pariwisata	489.890.000	482.138.550	98,42
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	489.890.000	482.138.550	98,42
IV	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	456.700.000	449.726.000	98,47
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	456.700.000	449.726.000	98,47
V	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	400.000.000	394.547.300	98,64
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100.000.000	97.995.000	98,00
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	150.000.000	296.552.300	98,85
VI	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	303.320.000	300.730.000	99,15
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	303.320.000	300.730.000	99,15

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi atas penyelenggaraan program kegiatan pada Tahun 2024 yang sekaligus menjadi masukan dan bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Pada tahun 2024 ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi memiliki 4 (empat) sasaran strategis serta 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum realisasi masing-masing IKU ada yang masih belum tercapai sesuai dengan target. Sementara apabila dibandingkan dengan target perencanaan jangka menengah (dalam hal ini Renstra Tahun 2024-2026), maka terlihat bahwa pada tahun 2024 ini hampir keseluruhan target yang telah ditetapkan tercapai. Dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi dalam Renja tahun 2024 sudah sesuai target yang ditetapkan.

4.2 Rencana Tindak

Berdasarkan hasil analisa ketercapaian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2024, terdapat beberapa hal-hal yang masih perlu

dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya diantaranya :

- 1) Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan melalui pengendalian dan evaluasi internal.
- 2) Meningkatkan sinergitas Program dan kegiatan yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi dengan instansi terkait serta stakeholder agar dapat mempertimbangkan perkembangan isu strategis/perubahan regulasi lokal, regional, dan nasional, sehingga dapat dengan cepat dilakukan penyesuaian kebijakan sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkandari Wali Kota kepada Kepala Dinas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi;
- 3) Meningkatkan promosi seni budaya dan pariwisata daerah didalam media film dan media online;
- 4) Meningkatkan peran pelaku ekonomi kreatif dalam mendukung peningkatan PAD;
- 5) Meningkatkan pemberdayaan pelaku seni tradisional Bekasi agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat Kota Bekasi.yang selaras dengan dokumen RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026;

Melalui Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) diharapkan dapat memberikan penjelasan dan gambaran pada semua pihak yang membutuhkan informasi kinerja serta dapat memberikan motivasi khususnya bagi bidang-bidang dilingkungan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam mencapai program maupun kegiatan pada masa yang akan datang.

Bekasi, 31 Januari 2024


Kepala Dinas Pariwisata Dan
Kebudayaan Kota Bekasi


Dr. Arief Maulana, S.T., M.M
Pembina Utama Muda IV.c
NIP. 19711013 199703 1 004